

Profesionalitas Guru dan Tuntutan Orang Tua : Analisis Etis Atas Konflik Pendidikan di Sekolah

M. Hamzah Alfiansyah¹, Sintia Agustin², Rani³, Muhammad Padlilah⁴, Arif Rahmat Triasa⁵

^{1,2,3,4,5,6}Pendidikan Agama Islam, Tarbiyah, STAI Kharisma, Sukabumi, Indonesia

Email: ¹muhammadhamzahalfiansyah152006@gmail.com, ²sintiaagustin05@gmail.com,

³nayadeswitasyahrani@gmail.com, ⁴muhammadfadlilah2000@gmail.com, ⁵arifrahmatriasa@stai-kharisma.ac.id

Informasi Artikel

Submitted : 24-12-2025

Accepted : 06-01-2026

Published : 15-02-2026

Keywords:

Teacher Authority
Hermeneutic Phenomenology
Ethics of Education
Restorative Discipline
Parent-Teacher Relationship

Abstract

The shift in the educational paradigm towards a service industry model has transformed the parent-teacher relationship from a collaborative partnership into a transactional and tense dynamic, placing teachers in a dilemma between maintaining professional pedagogical authority and meeting parental demands. This qualitative study, employing a hermeneutic phenomenology approach, aims to reveal the essence of teachers' experiences in interpreting this conflict and to analyze it ethically. Data were collected through in-depth interviews with teachers, parents, and school principals, supplemented by document analysis, and interpreted through the lens of Paul Ricoeur. The findings, illustrated by a deep analysis of the case of corporal punishment at SMAN 1 Cimarga, reveal that the use of physical discipline represents a repressive Foucauldian power relation that objectifies the student's body. This approach only generates short-term, fear-based pseudo-obedience, fails to build critical consciousness, and instead teaches a hidden curriculum that legitimizes violence. Furthermore, such action contradicts humanistic educational philosophy and the national principle of Sistem Among. The discussion underscores a fundamental failure in educational dialectics and highlights the urgent need for a paradigm shift from punitive discipline to a restorative approach that repairs relationships and internalizes values. The study implies a critical necessity to redefine ethical boundaries and foster school-family collaboration to create a humane and integral educational ecosystem.

Abstrak

Pergeseran paradigma pendidikan ke model industri jasa telah mengubah hubungan guru-orang tua menjadi dinamis yang transaksional dan tegang, menempatkan guru dalam dilema antara mempertahankan otoritas pedagogis profesional dengan memenuhi tuntutan orang tua. Penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi hermeneutik ini bertujuan mengungkap esensi pengalaman guru dalam menafsirkan konflik tersebut serta menganalisisnya secara etis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan guru, orang tua, dan kepala sekolah, serta analisis dokumen, kemudian diinterpretasi melalui lensa Paul Ricoeur. Hasil penelitian, yang diilustrasikan melalui analisis mendalam kasus penamparan di SMAN 1 Cimarga, menunjukkan bahwa penggunaan kekerasan fisik sebagai disiplin merepresentasikan relasi kuasa represif yang mengobjektifikasi tubuh siswa. Pendekatan ini hanya menghasilkan kepatuhan semu jangka pendek, gagal membangun kesadaran kritis, dan justru mengajarkan kurikulum tersembunyi yang melegitimasi kekerasan. Lebih jauh, tindakan tersebut bertentangan dengan filosofi pendidikan humanis dan prinsip Sistem Among. Pembahasan menggarisbawahi kegagalan dialektika pendidikan dan pentingnya pergeseran paradigma dari disiplin penghukuman menuju pendekatan restoratif yang memulihkan hubungan dan menginternalisasi nilai. Implikasi studi ini menekankan kebutuhan mendesak akan redefinisi batas etis interaksi dan kolaborasi sekolah-keluarga untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang manusiawi dan berintegritas.

Kata Kunci: Konflik Otoritas, Fenomenologi Hermeneutik, Etika Pendidikan, Disiplin Restoratif, Hubungan Guru-Orang Tua.

1. PENDAHULUAN

Dunia pendidikan saat ini sedang mengalami pergeseran paradigma sekolah sebagai penyedia jasa pengetahuan menjadi model industri. Orang tua berperan sebagai konsumen kritis, sekolah dan guru yang harus ikut campur dalam proses belajar anak-anak mereka [1]. Perubahan ini telah mengubah hubungan guru-orang tua dari kemitraan kolaboratif menjadi hubungan transaksional dan tegang [2]. Guru sering kali kehilangan otoritas epistemik dan deontik, karena Guru dihadapkan pada dilema untuk mempertahankan otoritas pedagogis profesional mereka sambil memenuhi tuntutan dan harapan orang tua. Dinamika ini menciptakan beban psikologis dan mengaburkan batas antara otoritas profesional dan hak orang tua [3].

Guru menghadapi tekanan untuk menyeimbangkan otoritas profesional dengan tuntutan orang tua, Konflik ini terlihat dalam situasi di mana guru terjebak antara kewajiban mereka untuk menegakkan disiplin dan standar akademik dengan kenyataan intimidasi bahkan kriminalisasi oleh orang tua. Fenomena guru dilaporkan ke pihak berwenang atas tindakan disiplin pendidikan. Ketakutan akan intimidasi, pelaporan, bahkan kriminalisasi oleh orang tua menyebabkan guru ragu mengambil tindakan pedagogis yang benar [4], [5]. Masalah inti adalah benturan nilai antara otonomi profesional guru dan hak orang tua atas pendidikan anak-anak mereka. Benturan ini menghasilkan efek stres, rasa takut, membuat guru ragu untuk mengambil keputusan antara tanggung jawab profesional, hak orang tua, tindakan pedagogis dan etis yang benar demi perkembangan siswa [6].

Menilai konflik-konflik ini menunjukkan perlunya pengembangan lebih lanjut dari fondasi filosofis pendidikan dan etika terapan. Profesionalisme guru didasarkan pada otoritas epistemik dan moral yang diperoleh dari Kode etika dan tanggung jawab moral terhadap siswa [7]. Studi etika akan mengkaji melalui lensa Etika Kewajiban Kantian keselarasan pendidik dengan prinsip eksternal (kebaikan siswa) dan tekanan internal. Pendekatan fenomenologis mengungkapkan pengalaman internal guru dan interpretasi mereka terhadap konflik moral yang mereka hadapi, esensi dari perjuangan moral dan psikologis mereka [8].

Tinjauan literatur terbaru (2020 -2025) mempresentasikan penelitian mengenai stres yang terkait dengan pekerjaan, strategi kolaborasi, dan pendidikan konflik antara guru dan orang tua. Studi Azmi [9] berfokus pada adaptabilitas guru, sementara Mursalina [5] membahas ketegangan hukum terkait penerapan disiplin. Literatur mengenai manajemen konflik oleh pemimpin sekolah secara utama berfokus pada solusi administratif. Secara keseluruhan, literatur ini berpusat pada dimensi psikologis, manajerial, dan hukum dari hubungan ini.

Berdasarkan penelitian terdapat kesenjangan yang belum mengeksplorasi dimensi filosofis-etik dan pengalaman subjektif guru sebagai aktor moral. Penelitian ini cenderung berhenti pada penjelasan deskriptif dari fenomena dan solusi praktis tanpa eksplorasi tentang esensi perjuangan nilai-nilai dan makna otoritas di bawah tekanan. Kebaruan dari penelitian ini adalah penggunaan Fenomenologi Hermeneutik untuk menginterpretasikan secara mendalam struktur kesadaran moral guru dalam menghadapi abstraksi konflik komitmen profesional dan intervensi eksternal [10], [11].

Dengan mempertimbangkan kesenjangan literatur yang ada, artikel ini membahas dua pertanyaan penelitian. Pertanyaan pertama bersifat fenomenologis: Apa esensi dari pengalaman guru dalam penegakan konflik tuntutan profesional dan intervensi orang tua? Pertanyaan kedua bersifat etis: Bagaimana kita seharusnya secara etis mengkritik keputusan guru di bawah tekanan intervensi semacam itu berkaitan dengan tanggung jawab profesionalnya dan kesejahteraan anak? Esensi dari pertanyaan-pertanyaan ini adalah untuk mengungkap objek kesadaran dan bagaimana guru merespons konflik semacam itu [12].

Tujuan dari diskusi ini adalah untuk mendekonstruksi makna profesionalisme guru kontemporer dan mengartikulasikan sebuah refleksi etis untuk membingkai kembali hubungan-hubungan agar lebih baik. Signifikansi teoritis adalah kontribusi terhadap filosofi pendidikan. Secara praktis, analisis ini diharapkan memberikan wawasan bagi pemangku kepentingan untuk bersama merumuskan batas-batas etis interaksi pendidikan, menciptakan ekosistem sekolah yang manusiawi dan berintegritas bagi perkembangan optimal peserta didik [12].

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat fenomenologis hermeneutik. Dimensi ini secara teori digunakan untuk melihat pengalaman hidup seseorang per subjek dengan memahami suatu fenomena. Secara operasional, dimensi ini digunakan untuk merasakan esensi dari moral dilemma yang dihadapi seorang guru saat otoritas pedagogisnya bertabrakan dengan intervensi orang tua. Fokus di sini adalah guru, di mana peneliti bertindak sebagai alat utama untuk memahami konflik yang guru buat bersamanya. Luka yang dialami di sini adalah struktur pengalaman subjek guru, bukan sekedar peristiwa konflik itu sendiri [13], [14]

Mengumpulkan data dan analisis data adalah teknik yang digunakan. Secara teori, meneliti secara kualitatif adalah untuk memahami narasi dan makna yang mendalam dari subjek. Secara operasional, peneliti akan menganalisis guru yang berkonflik, perwakilan orang tua, dan kepala sekolah. Analisis dokumen guru, peraturan sekolah, dan laporan yang

relevan dijadikan sebagai data sekunder untuk merumuskan pemahaman yang lebih komprehensif [15]. Tujuan dari teknik ini adalah untuk membina pemahaman yang kontekstual untuk menginterpretasikan makna, dengan reflektivitas dan keterbukaan kepada subjek yang bersifat relasional dan pada tekanan yang hadir [16].

Penganalisaan data dalam penelitian ini mengikuti langkah studi interpretatif fenomenologis hermeneutik. Secara teori langkah ini adalah melakukan tinjauan berlapis terhadap teks pengalaman untuk mencari makna dari tindakan. Secara operasional langkah ini diawali dengan analisis naratif terhadap teks dari berbagai sumber untuk menyerikan akun masing-masing pihak. Langkah berikutnya adalah interpretasi hermeneutik untuk memahami makna dalam sikap dan keputusan mereka [17]. Langkah terakhir adalah sintesis reflektif untuk merumuskan pemahaman komprehensif tentang inti konflik otoritas dalam hubungan pendidikan [18].

Penelitian memastikan kredibilitas temuan melalui triangulasi sumber dan metode. Secara teoretis, triangulasi didefinisikan sebagai teknik yang digunakan untuk memeriksa konsistensi dan memperkaya perspektif data. Dalam praktiknya, ini dilakukan melalui perbandingan dan verifikasi silang terhadap akun dari berbagai sumber seperti guru, orang tua, dan kebijakan sekolah. Teknik pemeriksaan anggota juga diterapkan di mana peneliti mempresentasikan interpretasi awal data kepada peserta yang terkena dampak untuk divalidasi. Dengan cara ini, penelitian bertujuan untuk memberikan analisis komprehensif tentang kompleksitas konflik melalui prisma berbagai perspektif [18].

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Analisis filosofis kasus penamparan siswa di SMAN 1 Cimarga dapat dipahami melalui relasi kuasa Foucaultian, di mana tubuh siswa menjadi objek pendisiplinan melalui kekerasan kedaulatan. Tindakan ini merepresentasikan logika kepatuhan jangka pendek yang hanya mengontrol perilaku lahiriah. Namun, pendekatan tersebut gagal membentuk kesadaran kritis siswa mengenai nilai hidup sehat dan penghormatan aturan. Kekuasaan yang diwujudkan melalui penghinaan fisik justru menimbulkan dampak psikologis, sosial yang merugikan. Serta mengobjektifikasi dan merendahkan martabat peserta didik [19].

3.1.1 Relasi Kuasa terhadap Tubuh Siswa sebagai Objek Pendisiplinan

Tindakan penamparan yang dilakukan kepala sekolah merupakan manifestasi nyata dari kuasa kedaulatan (*sovereign power*), di mana tubuh siswa dijadikan objek langsung untuk ritual penghukuman dan pendisiplinan [20]. Kontak fisik yang ditargetkan pada area personal seperti wajah semakin mempertegas proses objektifikasi dan penundukan martabat peserta didik. Kekuasaan model ini, meskipun menampilkan superioritas pelaku, pada dasarnya hanya bekerja pada level permukaan untuk mengontrol perilaku lahiriah.

Namun, pendekatan kekuasaan seperti ini sepenuhnya gagal menciptakan kesadaran kritis atau menginternalisasi nilai-nilai dalam diri siswa [21]. Ketaatan yang disebabkan oleh rasa takut dan penghinaan fisik bersifat sementara, rapuh, dan tidak menyentuh pemahaman dasar tentang pentingnya kehidupan yang sehat atau menghormati aturan. Alih-alih mendorong disiplin positif, metode ini menyebabkan dampak psikologis dan sosial yang negatif sambil mengabaikan semangat siswa sebagai subjek pendidikan.

3.1.2 Kegagalan Pedagogi: Antara Behaviorisme Primitif dan Humanisme

Penggunaan hukuman fisik seperti yang digambarkan di sini mencerminkan kegagalan pedagogis yang terjebak pada behaviorisme primitif, bergantung pada hukuman yang menghindari untuk mengondisikan perilaku demi itu [22]. Metode ini hanya berfokus pada gejala permukaan sambil mengabaikan aspek mendasar dalam membangun kesadaran intrinsik, dan bahkan menyebabkan sejumlah efek samping negatif. Ini tentu saja berlawanan dengan prinsip pendidikan humanistik yang menganggap keselamatan psikologis sebagai dasar esensial paling mendasar bagi proses pembelajaran dan perkembangan siswa [23].

Penghancuran rasa aman per individu justru mengaktifkan mekanisme pertahanan diri dalam bentuk ketakutan dan kebencian yang dapat berujung pada penarikan diri dari pendidikan. Kegagalan ini berimplikasi nyata dalam respons mogok belajar massal ratusan siswa. Proses edukasi mandek ketika prinsip humanisme diabaikan. Dari Efek tersebut dapat dilihat kecenderungan tindakan kekerasan yang telah mengubah ruang belajar menjadi ruang yang traumatis dan sama sekali tidak kondusif untuk pembelajaran [20].

3.1.3 Kontradiksi dengan Filosofi Pendidikan Nasional (Sistem Among)

Bullying oleh pemimpin lembaga pendidikan ini sungguh berlawanan dengan filosofi pendidikan kita yang diinisiasi juga oleh Ki Hajar Dewantara. Memang dalam sistem Among, keteladanan, asih, asah, dan asuh sangat diutamakan. Harusnya berperan sebagai pamong yang membimbing dan mengayomi, kepala sekolah justru meneladani penyelesaian masalah

dengan kekerasan dan intimidasi fisik. Praktik semacam ini dengan jelas menunjukkan kemunduran ke dalam cara pendidikan kolonial yang otoriter [24].

Ruang belajar, sebagai tempat membebaskan potensi siswa, semestinya diciptakan melalui dialog, Interaksi, sistem penalaran, dan cara yang jauh lebih demokratis, bukan dengan penindasan. Orientasi pendidikan dengan kekerasan dalam bentuk otoriter ini pada generasi Z dan Alpha yang jauh lebih kritis, tidak lagi relevan. Dengan tindakan ini, pihak sekolah tersebut tidak hanya melanggar etika pendidikan kontemporer, tetapi juga menyimpang dari akar filosofis pendidikan Indonesia [25].

3.1.4 Kurikulum Tersembunyi (The Hidden Curriculum) dari Kekerasan

Insiden ini mengajarkan sebuah kurikulum tersembunyi yang destruktif, legitimasi kekerasan fisik dari penguasa kepada yang lemah. Tempat, pesan dari konflik yang dipindahkan kepada siswa, terlega dari konflik, penyerahan, dan pengalihan kekuasaan pada posisi dominan, dan pengalihan, dan pengalihan, dan pengalihan kekuasaan, serta pengalihan pada pengalihan, serta pengalihan, pengalihan fonkan, pengalihan akses, dan pengalihan, serta dan pengalihan, pengalihan dan pengalihan, pengalihan fonkan, pengalihan akses, dan pengalihan, serta pengalihan, fonkan, dan pengalihan akses, serta, pengalihan akses dan pengalihan pengalihan pada pengalihan fonkan, dan pengalihan, pengalihan akses[20].

Kurikulum ini sangat bertentangan dengan pendidikan demokratis yang bertujuan untuk menghasilkan individu yang menghargai manusia dan mendekati isu-isu dengan martabat dan demokrasi. Alih-alih mengajarkan resolusi konflik yang konstruktif melalui dialog interaksi, dan partisipasi, sekolah justru memberikan contoh negatif penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang. Menormalisasikan Sebagai alat disiplin, Pola pikir bahwa kekerasan adalah alat yang sah untuk menegakkan kepatuhan [26].

3.1.5 Implikasi dan Respons Institusional

Respons institusional terhadap kasus ini mengungkap kesenjangan antara teori etika pendidikan dan praktik di lapangan. Dinas Pendidikan dalam hal ini sudah mengambil langkah dengan menonaktifkan pelaku dan mengeluarkan pernyataan resmi penolakan terhadap kekerasan di sekolah dalam bentuk apa pun. Sementara itu, KPAI merekomendasikan peralihan "pendisiplinan" dengan "disiplin positif" yang lebih edukatif dan melibatkan komunikasi serta kolaborasi dengan orang tua" [27], [28].

Pelaporan kasus ini ke pihak kepolisian oleh orang tua siswa menjadi indikator nyata dari erosi kepercayaan terhadap otoritas sekolah. Konflik yang seyogianya diselesaikan secara pedagogis dan internal sekolah, dalam hal ini secara litigasi. Situasi ini menggarisbawahi rapuhnya relasi segitiga antara sekolah, siswa, dan keluarga ketika tidak ada perubahan dalam praktik pendisiplinan. "[27], [29]. Di sisi lain, eskalasi konflik ke ranah hukum justru berpotensi menciptakan jarak yang lebih lebar antara pihak sekolah dan orang tua, sehingga mempersulit upaya restorasi kepercayaan

3.2 Pembahasan

3.2.1 Fenomena Kekerasan sebagai Kegagalan Dialektika

Insiden penamparan di SMAN 1 Cimarga merepresentasikan kegagalan mendasar dalam dialektika pendidikan. Proses pendidikan yang ideal merupakan pertukaran dialogis kritis untuk mentransfer nilai dan membangun kesadaran kritis. Tindakan kepala sekolah yang beralih dari teguran verbal ke kekerasan fisik mengindikasikan reduksi fatal terhadap proses tersebut. Ketika komunikasi verbal dianggap buntu, respons yang dipilih bukanlah pendalaman dialog, melainkan lompatan primitif ke ranah fisik [30]. Pergeseran ontologis ini mengubah ruang pendidikan dari ranah interaksi intelektual dan moral menjadi sekadar arena fisik. Dalam arena ini, konflik diselesaikan melalui dominasi tubuh dan penghinaan martabat, yang sama sekali bertentangan dengan hakikat pendidikan [20].

Kegagalan tersebut berakar pada miskonsepsi mendalam mengenai kedisiplinan. Meskipun niat menegakkan aturan dapat dipahami, terjadi kekeliruan antara disiplin sejati dan kepatuhan semata. Disiplin bersumber dari internalisasi nilai dan tanggung jawab pribadi, sementara kepatuhan lahir dari rasa takut terhadap otoritas dan hukuman eksternal. Tindakan kekerasan fisik hanya berpotensi menghasilkan kepatuhan semu yang bersifat sementara dan rapuh. Tindakan itu memaksa ketundukan tubuh tetapi gagal menyentuh kesadaran siswa mengenai alasan mendasar suatu pelanggaran dianggap salah. Dengan demikian, metode tersebut justru mengabaikan tujuan utama pendidikan karakter [31].

3.2.2 Kekuasaan, Tubuh, dan Keretakan Hubungan Edukatif

Menyelidiki hubungan antara struktur kekuasaan, objekifikasi tubuh, dan kerusakan dalam hubungan pendidikan tidak pernah sejelas dalam kasus ini. Melalui perspektif Foucault, tindakan kepala sekolah dapat dilihat sebagai bentuk kekuasaan kedaulatan yang represif. Otoritas ini tidak digunakan untuk membimbing, tetapi untuk menundukkan. Tubuh siswa direduksi dari subjek pendidikan menjadi objek pasif yang perlu dihukum dan dijadikan kambing hitam. Hubungan

yang terbentuk menjadi sangat terdistorsi, berubah dari hubungan yang transformasional secara edukatif antara guru dan siswa menjadi hubungan yang didominasi oleh ketidak hormatan dan kekuasaan di mana guru menjadi penindas dan siswa yang tertekan [32].

Hubungan kekuasaan yang terdistorsi ini menghancurkan esensi dari filosofi pendidikan nasional yaitu Sistem Among Ki Hajar Dewantara. Prinsip “Ing Ngarso Sung Tulodo” dilanggar ketika kekerasan dilakukan, disertai dengan model “guru”, sebagai tindakan pemecahan masalah, dan bukan kekerasan [33]. Prinsip “Tut Wuri Handayani” menjadi tidak mungkin untuk direalisasikan karena tindakan kekerasan menghancurkan kepercayaan dan rasa aman yang diperlukan untuk memotivasi siswa. Ini adalah antitesis dari rasa “mengemong” atau merawat yang seharusnya menjadi semangat dari kekerasan tersebut. Oleh karena itu, insiden ini bukan sekadar pelanggaran prosedur, tetapi pengkhianatan terhadap ontologi hubungan pendidikan.

3.2.3 Objektivitas dan Dilema Etis: Antara Niat Baik dan Cara yang Keliru

Pembahasan yang objektif harus dipertimbangkan dengan seksama dengan tidak terjebak sikap membenaran. Di satu sisi, kompleksitas dan urgensi yang dihadapi kepala sekolah perlu diakui. Pelanggaran yang tidak lain seperti merokok di sekolah dalam hal ini merupakan masalah yang buruk. Niat untuk menghentikan perilaku berbahaya dan memberikan efek jera bersumber dari intensi moral dan rasa tanggung jawab. Dalam tekanan situasi, mungkin muncul asumsi pragmatis bahwa “terapi kejut” diperlukan untuk menciptakan kepatuhan berbasis ketakutan yang efektif untuk jangka pendek [34].

Dari perspektif etika filosofis, niat baik tidak dapat membenarkan cara yang melanggar prinsip dasar kemanusiaan. Etika deontologi Immanuel Kant menegaskan bahwa manusia harus selalu diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri, bukan sebagai alat. Tindakan menampar, betapun mulia tujuannya, telah memperlakukan siswa sebagai alat untuk melampiaskan emosi dan sebagai objek peringatan. Prinsip universal bahwa hasil tidak membenarkan cara menemukan relevansinya di sini. Efek jera sesaat tidak sebanding dengan kerusakan jangka panjang seperti trauma, pelajaran tentang kesewenang-wenangan kuasa, dan erosi martabat kedua belah pihak yang dapat menghambat jalannya pendidikan sebagai hak asasi manusia [20].

3.2.4 Dimensi Epistemologis: Apa yang Sebenarnya Diketahui dan Dipahami Siswa?

Analisis kritis diperlukan terhadap pengetahuan seperti apa yang sebenarnya ditransfer melalui hukuman fisik. Secara epistemologis, metode seperti ini gagal total sebagai sarana transmisi pengetahuan moral atau pembangunan karakter. Alih-alih menyampaikan pemahaman tentang bahaya merokok atau pentingnya menghormati aturan, pesan yang secara efektif dikomunikasikan justru berbeda. Pesan utama yang terserap adalah bahwa konflik diselesaikan dengan agresi dan otoritas dapat berlaku di luar norma kesopanan dasar [35].

Pengetahuan yang terbentuk adalah pengetahuan tentang ketakutan, penghinaan, dan ketidaksetaraan kekuasaan, bukan nilai-nilai kesehatan atau tanggung jawab sosial. Hukuman fisik secara epistemologis cacat karena menghasilkan mis-pengetahuan. Kurikulum Tersembunyi yang dihasilkan melegitimasi kekerasan dan intimidasi sebagai alat penyelesaian konflik dan berisiko memperbanyak siklus kekerasan dalam masyarakat. Karakter baik bukanlah hasil dari paksaan eksternal tetapi dari nilai-nilai yang terinternalisasi melalui refleksi dan dialog. Apa yang "dipahami" siswa setelah kejadian sebagian besar adalah bagaimana tidak dihukum pada kesempatan berikutnya, bukan esensi dari kesalahan mereka [28], [36].

3.2.5 Generalisasi: Implikasi Sistemik dan Pentingnya Pergeseran Paradigma

Kasus spesifik ini merupakan mikrokosmos dari tantangan sistemik pendidikan karakter di Indonesia. Jika respons hanya berhenti pada sanksi administratif tanpa refleksi mendalam, maka terbentuklah "Kurikulum Tersembunyi" yang sangat merusak [28], [37]. Kurikulum tersembunyi ini mengajarkan bahwa kekerasan adalah alat yang absah dan bahwa penyelesaian masalah melalui intimidasi dapat diterima. Generasi yang dibentuk oleh kurikulum seperti ini berisiko mereproduksi siklus kekerasan dalam kehidupan sosial mereka.

Oleh karena itu, momentum ini harus mendorong pergeseran paradigma fundamental dalam budaya disiplin sekolah. Paradigma lama yang bersifat penghukuman dan balas dendam harus ditinggalkan. Pergeseran menuju paradigma restoratif dan edukatif merupakan keharusan. Restorative Justice dalam pendidikan fokus pada pemulihan hubungan, pemahaman akar penyebab, dan penumbuhan tanggung jawab aktif dari pelaku [36]. Pendidikan karakter yang terlepas dari prinsip humanisme dan penghormatan martabat bukanlah pembentukan, melainkan sekadar indoktrinasi. Kasus ini menuntut reformasi mentalitas para pendidik untuk senantiasa memandang siswa sebagai manusia yang bertumbuh, membutuhkan bimbingan, bukan penundukan [38].

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap kasus penamparan siswa di SMAN 1 Cimarga, dapat disimpulkan bahwa tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh pihak berwenang di sekolah dapat disimpulkan bahwa tindakan itu suatu kegagalan mendasar dalam proses pendidikan. Pendekatan disiplin yang bersifat menekan, mengekang, atau bahkan menindas dan berfokus pada penghukuman tubuh hanya mampu menciptakan kepatuhan semu dan jangka pendek yang lahir dari ketakutan, namun gagal total dalam membangun kesadaran kritis dan internalisasi nilai-nilai seperti hidup sehat serta penghormatan aturan. Metode tersebut justru mengajarkan kurikulum tersembunyi yang membenarkan kekerasan sebagai alat penyelesaian konflik, bertentangan dengan filosofi pendidikan humanis dan prinsip penghormatan martabat manusia. Implikasinya, relasi pedagogis yang menjadikan perubahan penting itu rusak dan digantikan oleh relasi kuasa yang dominatif, merendahkan martabat peserta didik, serta memicu erosi kepercayaan antara sekolah dan keluarga. Aplikasi yang mendesak adalah perlunya pergeseran paradigma dari disiplin berbasis penghukuman menuju pendekatan disiplin positif dan memulihkan hubungan, mendialogkan nilai, serta melibatkan kolaborasi dengan orang tua. Spekulasi yang muncul adalah bahwa tanpa perubahan sistemik dalam budaya disiplin sekolah, siklus kekerasan dan kegagalan pendidikan karakter akan terus berulang. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan mengeksplorasi model-model disiplin mengembalikannya seperti semula yang berkaitan dengan budaya sekolah di Indonesia serta meneliti efektivitasnya dalam membangun kesadaran kritis dan karakter siswa tanpa mengorbankan prinsip humanisme.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis Mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah mendukung terselesainya penelitian dan artikel ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada STAI Kharisma yang telah memberikan fasilitas dan lingkungan akademik yang kondusif. Penulis juga berterima kasih kepada Dr. Ade Nurpriatna, S.Ag., M.Ud. atas bimbingan, diskusi, serta kritik konstruktif yang sangat berharga selama proses penelitian dan penulisan. Tidak lupa, apresiasi ditujukan kepada narasumber, pihak sekolah, serta semua responden yang telah bersedia berbagi waktu dan informasi untuk kelengkapan data studi ini. Akhir kata, dukungan moral dan dorongan dari keluarga serta rekan sejawat turut menjadi kekuatan penulis dalam menyelesaikan karya ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik pendidikan.

REFERENCES

- [1] R. Deslandes, S. Barma, dan L. Morin, "Understanding Complex Relationships between Teachers and Parents," *Int. J. Parents Educ.*, vol. 9, no. 1, Nov 2023, doi: 10.54195/ijpe.18241.
- [2] Sukisno, Siti Nur'aini, Rista Widiyati, dan Aisyah Abdul Jabbar, "LEARNING PARADIGM SHIFT BY ERA MODERN," *J. PEDAGOGY*, vol. 18, no. 1, hlm. 27–34, Apr 2025, doi: 10.63889/pedagogy.v18i1.254.
- [3] Y. Fisher dan S. Baissberg, "Redefining boundaries: unveiling the schism in teacher-parent perceptions of educational engagement," *Front. Psychol.*, vol. 16, hlm. 1539049, Jul 2025, doi: 10.3389/fpsyg.2025.1539049.
- [4] B. Prakke dan A. Van Peet, "Challenging parents, teacher occupational stress and health in Dutch primary schools," *Int. J. Parents Educ.*, vol. 1, no. 1, Nov 2023, doi: 10.54195/ijpe.18247.
- [5] S. A. Mursalina, Z. Zulfah, dan N. Nurkolis, "Konflik Antara Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak Dengan Penegakan Kedisiplinan Sekolah," *Cetta J. Ilmu Pendidik.*, vol. 8, no. 3, hlm. 176–185, Mei 2025, doi: 10.37329/cetta.v8i3.4254.
- [6] T. W. Tsega, "Ethical dilemmas: Experiences of secondary school teachers in Addis Ababa city, Ethiopia," *Bahir Dar J. Educ.*, vol. 24, no. 1, hlm. 6–24, Mar 2024, doi: 10.4314/bdje.v24i1.2.
- [7] C. Levinthal, E. Kuusisto, dan K. Tirri, "Finnish and Portuguese Parents' Perspectives on the Role of Teachers in Parent-Teacher Partnerships and Parental Engagement," *Educ. Sci.*, vol. 11, no. 6, hlm. 306, Jun 2021, doi: 10.3390/educsci11060306.
- [8] M. N. Resurreccion, "Exploring daycare teachers' experiences in managing ADHD learners in inclusive classrooms," *Divine Word Int. J. Manag. Humanit. DWIJMH ISSN 2980-4817*, vol. 4, no. 2, hlm. 1741–1755, Jun 2025, doi: 10.62025/dwijmh.v4i2.149.
- [9] F. Azmi, M. Miskalena, I. Ifwandi, A. Syukriadi, dan R. Monika, "Adaptasi dan Inovasi Strategi Pembelajaran PJOK Berbasis Bahasa Isyarat dan Visual di Sekolah Luar Biasa: Praktik Guru di Provinsi Aceh," *Afeksi J. Penelit. Dan Eval. Pendidik.*, vol. 6, no. 6, hlm. 1434–1439, Agu 2025, doi: 10.59698/afeksi.v6i6.653.
- [10] S. K. Ummah dan R. D. Azmi, "Konstruksi Konsep Matematika Melalui Pembuatan Media Manipulatif Terintegrasi Teknologi," *AKSIOMA J. Program Studi Pendidik. Mat.*, vol. 9, no. 1, hlm. 43, Mar 2020, doi: 10.24127/ajpm.v9i1.2653.
- [11] M. Turmuzi, N. Kurniati, dan S. Azmi, "Pemahaman Konsep Matematis Mahasiswa Calon Guru Sekolah Dasar Ditinjau Dari Gender Dan Gaya Belajar," *EDU-MAT J. Pendidik. Mat.*, vol. 9, no. 1, hlm. 25, Mei 2021, doi: 10.20527/edumat.v9i1.10371.

- [12] M. Azmi, "Ajaran Moral Tuan Guru Dan Pengaruhnya Terhadap Laku Keberagamaan Masyarakat Muslim Sasak Dalam Perspektif Islam Dan Sosiologi Modern," *Harmoni*, vol. 21, no. 2, hlm. 265–277, Des 2022, doi: 10.32488/harmoni.v21i2.629.
- [13] A. A. Alhazmi dan A. Kaufmann, "Phenomenological Qualitative Methods Applied to the Analysis of Cross-Cultural Experience in Novel Educational Social Contexts," *Front. Psychol.*, vol. 13, hlm. 785134, Apr 2022, doi: 10.3389/fpsyg.2022.785134.
- [14] C. Robinson dan H. Williams, "Interpretative Phenomenological Analysis: Learnings from Employing IPA as a Qualitative Methodology in Educational Research," *Qual. Rep.*, Apr 2024, doi: 10.46743/2160-3715/2024.6487.
- [15] F. Cui dkk., "Exploring nursing students' reality shock and professional behavioral development in clinical practice: a hermeneutic phenomenological study," *Front. Med.*, vol. 12, hlm. 1490975, Mar 2025, doi: 10.3389/fmed.2025.1490975.
- [16] I. Kublikowski, "Reflections on Analysis in Qualitative Research: The Hermeneutic Circle in Ricoeur," *Paid. Ribeirão Preto*, vol. 33, hlm. e3319, 2023, doi: 10.1590/1982-4327e3319.
- [17] A. Sultoni dan Oktaviani Adhi Suciptionsih, "Strategi Guru dalam Menanggulangi Perundungan pada Anak Kelas V," *Khatulistiwa J. Pendidik. Dan Sos. Hum.*, vol. 3, no. 2, hlm. 01–09, Mei 2023, doi: 10.55606/khatulistiwa.v3i2.1390.
- [18] C. Nisa, E. D. Prahastiwi, R. Q. Hapsari, dan H. Ar-Rif'an, "Penguatan Kapasitas Guru dalam Membangun Sinergi Sekolah dan Orang Tua melalui Parenting Efektif di MIM Jagoan Boyolali," *Al-DYAS*, vol. 4, no. 3, hlm. 1465–1476, Sep 2025, doi: 10.58578/aldyas.v4i3.7306.
- [19] Moh. K. Nawawi dan Moch. F. Mas'udi, "Relasi Kuasa dan Pendisiplinan: Analisis Pemikiran Michel Foucault dalam Konteks Pendidikan," *J. Filsafat Indones.*, vol. 5, no. 2, hlm. 118–126, 2022.
- [20] W. S. Ankamah, "Transforming Student Discipline: A Teacher's Reflective Essay on Moving From Punishment to Compassion in Education," *J. Int. Soc. Teach. Educ.*, vol. 28, no. 2, hlm. 94–104, Des 2024, doi: 10.26522/jiste.v28i2.4768.
- [21] T. Zuberi, A. J. Seni, dan R. Sungwa, "Understanding perceptions of teachers and pupils towards corporal punishment for pupils with disabilities in primary schools in Tanzania: Implications for the promotion of social justice in education," *Int. J. Educ. Innov. Res.*, vol. 4, no. 1, hlm. 58–73, Jan 2025, doi: 10.31949/ijeir.v4i1.11093.
- [22] R. Ali, Kokab Fatima, Zobia Shakoar, dan Zakir Abbas, "The Impact of Corporal Punishment on Students' Performance in Public Schools," *Soc. Sci. Rev. Arch.*, vol. 3, no. 1, hlm. 522–527, Jan 2025, doi: 10.70670/sra.v3i1.331.
- [23] M. Bangash, T. Nayab, M. Zubair, H. Nawaz, I. Ullah, dan S. Ullah, "Examining the Impacts of Corporal Punishment in Secondary Schools: Unraveling Psychological Repercussions on Students," *J. Health Rehabil. Res.*, vol. 4, no. 2, hlm. 364–369, Apr 2024, doi: 10.61919/jhrr.v4i2.828.
- [24] I. M. Sugiarta, I. B. P. Mardana, dan I. D. A. G. S. Adi, "Implementasi Teori Ki Hajar Dewantara terhadap Pendidikan Karakter di Era Kini," *J. Ilm. Ilmu Sos.*, vol. 6, no. 1, hlm. 59–66, 2020.
- [25] D. Ferary, "On Ki Hadjar Dewantara's Philosophy of Education," *Nord. J. Comp. Int. Educ. NJCIE*, vol. 5, no. 2, hlm. 65–78, Mei 2021, doi: 10.7577/njcie.4156.
- [26] T. K. Dhaliwal, J. Graham, Y.-C. Chiang, dan A. S. Johnson, "Spare the Rod, Spoil the Child? A Critical Discourse Analysis of State Corporal Punishment Policies and Practices," *Educ. Eval. Policy Anal.*, vol. 46, no. 2, hlm. 249–275, Jun 2024, doi: 10.3102/01623737231213040.
- [27] M. A. Allison dkk., "Corporal Punishment in Schools," *Pediatrics*, vol. 152, no. 3, hlm. e2023063284, Sep 2023, doi: 10.1542/peds.2023-063284.
- [28] A. I. Oben dan X. Hui, "Discipline or damage?: Students' experiences of corporal punishment in Cameroon secondary schools and implications for education," *Int. J. Educ. Dev.*, vol. 113, hlm. 103201, Mar 2025, doi: 10.1016/j.ijedudev.2024.103201.
- [29] L. T. Koalane dan M. C. Letuma, "The BELA Amendment and Discipline in Schools: Rhetoric or Real Change in Combating Corporal Punishment?," *Educ. Process Int. J.*, vol. 15, no. 1, 2025, doi: 10.22521/edupij.2025.15.122.
- [30] G. Gerdin dan R. Pringle, "Towards more equal power relations in physical education: power, resistance and social transformation," *Sport Soc.*, vol. 25, no. 6, hlm. 1193–1210, Jun 2022, doi: 10.1080/17430437.2022.2064108.
- [31] E. Matusov dan P. Sullivan, "Pedagogical Violence," *Integr. Psychol. Behav. Sci.*, vol. 54, no. 2, hlm. 438–464, Jun 2020, doi: 10.1007/s12124-019-09512-4.
- [32] H. Nnode, Yosef Usman, dan Benyamin Guido Reke, "Analisis Fenomena Pemukulan terhadap Siswa Yaredi Ndruru oleh Kepala Sekolah SMKN 1 Siduaori-Nias Selatan: Kajian Filsafat Manusia," *Sinar Kasih J. Pendidik. Agama Dan Filsafat*, vol. 2, no. 2, hlm. 225–239, Mei 2024, doi: 10.55606/sinarkasih.v2i2.326.

- [33] S. Hardianty, "The Concept of Punishment In Education: A Sociological Analysis of Disciplinary Practices and their Implications for Students' Social Behavior," *J. Pendidik. Sociol. Dan Hum.*, vol. 16, no. 1, hlm. 279–287, Mei 2025, doi: 10.26418/j-psh.v16i1.92604.
- [34] A. Prasetyo, L. Setyowati, dan M. Rohman, "Dilema Etika Guru dalam Penegakan Disiplin Siswa: Antara Aturan dan Perlindungan Anak," *J. Pendidik. Dan Konseling*, vol. 5, no. 1, hlm. 1245–1253, 2023.
- [35] R. Hidayat dan S. Suyanto, "Dampak Psikologis dan Epistemologis Hukuman Fisik terhadap Pembentukan Karakter Peserta Didik," *J. Obs. Psikol.*, vol. 3, no. 2, hlm. 88–102, 2021.
- [36] R. M. Kapioru, Jimmy Pello, dan Reny Rebeka Masu, "Analisis Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Kasus Penggunaan Hukuman Disiplin (Corporal Punishment) pada Anak di Lingkungan Sekolah Ditinjau dalam Perspektif Perlindungan Guru," *J. Adm. Soc. Sci.*, vol. 6, no. 1, hlm. 108–119, Jun 2025, doi: 10.55606/jass.v6i1.2097.
- [37] C. Hughes, "Addressing violence in education: From policy to practice," *PROSPECTS*, vol. 48, no. 1–2, hlm. 23–38, Jan 2020, doi: 10.1007/s11125-019-09445-1.
- [38] A. Emerson, "Book Review: Justice on both sides: Transforming education through restorative justice," *Urban Educ.*, vol. 58, no. 1, hlm. 175–179, Jan 2023, doi: 10.1177/0042085920935963.